

POLA DAN PERKEMBANGAN KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

Djisman S. SIMANDJUNTA

PENGANTAR

Berbeda dengan LAFTA, CACM dan Pasar Bersama Afrika Timur yang masing-masing menyetujui program integrasi yang ambisius sejak pendiriannya, ASEAN memilih sikap berhati-hati dalam kerja sama regionalnya. Sejak pendiriannya ASEAN belum pernah menyebut bahwa dari kerja sama regional yang mereka jalin sejak tahun 1967 akan lahir integrasi ekonomi dalam satu atau lain bentuk. Baik dalam Deklarasi Bangkok maupun dalam Deklarasi Kesepakatan yang disetujui dalam Pertemuan Puncak Bali 1976 tidak ada komitmen sesama negara-negara ASEAN untuk mendirikan integrasi dalam satu atau lain bentuk.

Kehati-hatian ini mempunyai alasan-alasan kuat. Pengalaman di kawasan-kawasan lain telah menunjukkan bahwa program yang ambisius tidak merupakan jaminan keberhasilan dalam kerja sama regional. Bagaimanapun baiknya suatu "cetak biru," ia tidak lebih dari kertas bekas kalau tidak didukung oleh kemauan politis yang pada gilirannya adalah produk dari berbagai faktor termasuk pertimbangan ekonomis.

Ini tidak berarti bahwa di negara-negara ASEAN tidak ada yang membicarakan integrasi ekonomi. Pribadi-pribadi, pejabat dan kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat telah mengutarakan ketidakpuasannya dengan kerja sama ekonomi ASEAN selama ini dan menuntut kepastian tentang bentuk kerja sama regional yang dituju oleh ASEAN. Suatu satuan tugas (task force) telah dibentuk dan menyelenggarakan sidang enam kali dengan maksud untuk menilai kerja sama ekonomi ASEAN selama ini dan mencari alternatif-alternatif baru untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut. Dari sidang-sidang ini timbul pandangan-pandangan kontroversial tentang "market sharing" dan resource pooling yang seharusnya dilakukan oleh ASEAN.

masing-masing, yang tidak selalu sama atau sejajar. Kumpulan kepentingan nasional negara-negara anggota ASEAN belum tentu berarti perkembangannya kepentingan regional ASEAN. Tetapi dalam beberapa hal dan pada taraf-taraf tertentu kepentingan-kepentingan nasional itu bertemu dan merupakan kepentingan bersama. Inilah yang memungkinkan kerja sama. Bahwa ASEAN tidak ditujukan ke arah integrasi regional jelas juga dari pertimbangan dalam Deklarasi Bangkok yang sebagian telah dikutip di atas, yang menyatakan bahwa negara-negara anggota "bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan mereka dari campur tangan luar dalam bentuk dan manifestasi apa pun untuk memelihara identitas nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi-aspirasi rakyat mereka."

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Penilaian tentang keberhasilan ASEAN hendaknya ditinjau terutama dari segi motivasi dasar dan maksud serta tujuan pokok pembentukannya, yang kesemuanya bersifat politis dan bersandikan pada kepentingan keamanan. Kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, adalah tujuan-tujuan antara untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan jangka panjang yang pada dasarnya bersifat politis dan bersandikan pada kepentingan keamanan.

Ditinjau dari segi motivasi dan maksud serta tujuan pokok pembentukannya, pada hakikatnya ASEAN adalah suatu kerja sama politik dan keamanan. Terbinanya kerja sama dalam bidang politik telah memungkinkan perkembangannya kecenderungan bukan saja ke arah peningkatan ASEAN sebagai suatu kawasan tersendiri walaupun bukannya integrasi, tetapi lebih penting ke arah pembentukan suatu masyarakat keamanan. Perkembangan itu akan membantu melindungi negara-negara anggota ASEAN terhadap kemungkinan ancaman penetrasi dan campur tangan luar. Ini berarti ASEAN telah dapat mengembangkan jaminan yang lebih besar bagi keamanan negara-negara anggotanya.

Berkembangnya kecenderungan-kecenderungan itu merupakan hasil-hasil positif yang telah dapat dicapai dalam kerja sama ASEAN. Tetapi masalah-masalah utama yang harus dihadapi selanjutnya adalah apakah kecenderungan-kecenderungan seperti itu dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pelembagaannya tanpa tergantung pada tantangan-tantangan dari luar, apakah ASEAN dapat terus mengatasi atau sekurang-kurangnya ataupun ken-

negara anggota ASEAN, keduanya membantu menetralisasi adanya perbedaan-perbedaan dan bahkan perselisihan atau konflik-konflik di antara mereka. Sebenarnya seperti dinyatakan dalam Deklarasi Kerukunan ASEAN "penyelesaian konflik-konflik intra-regional melalui cara damai selemkas mungkin" merupakan salah satu program politik yang ditetapkan dalam Pertemuan Puncak Bali. Dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara yang juga ditandatangani pada Pertemuan Puncak Bali antara lain merupakan usaha untuk menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik-konflik intra-regional secara damai itu. Tetapi mekanisme itu belum lagi berjalan atau termanfaatkan secara nyata dan efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik semacam itu. Meskipun demikian, sementara itu kedua faktor yang disebutkan tadi sekurang-kurangnya bukan saja membantu menetralisasi konflik-konflik intra-regional tetapi juga membantu mencegah timbulnya konflik-konflik baru. Lebih penting lagi walaupun mekanisme yang telah diciptakan tidak atau belum mampu menyelesaikan konflik-konflik intra-regional secara damai seperti yang dimaksudkan, faktor-faktor tersebut akan membantu mencegah atau sekurang-kurangnya memperkecil kemungkinan ditempuhnya cara-cara kekerasan dalam konflik-konflik semacam itu.

Dengan demikian, dalam rangka ASEAN sebenarnya dapat dikatakan telah berkembang suatu kecenderungan ke arah pembentukan daripada apa yang dinamakan suatu "masyarakat keamanan" (security community),¹ di mana kemungkinan ditempuhnya cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan konflik-konflik di antara anggota-anggotanya sudah menjadi begitu kecil bahkan hampir-hampir lenyap. Jelas bahwa suatu masyarakat keamanan bukan suatu pakta keamanan atau pakta militer, yang tidak pernah menjadi tujuan ASEAN.

Keempat, dengan berkembangnya kecenderungan ke arah pelembagaan inter-komunikasi dan interaksi yang intensif di antara sesama negara anggota, dan dengan demikian ke arah suatu masyarakat keamanan, ASEAN telah berhasil pula memberi isi pada pengertian kerja sama "regional" seperti yang tercantum dalam bagian pertama Deklarasi Bangkok. Sering diragukan dan diperdebatkan apakah Asia Tenggara dapat dianggap sebagai suatu "region" atau kawasan tersendiri. Asia Tenggara tidak merupakan seperangkat negara-

¹Konsep ini mula-mula dikembangkan oleh Karl W. Deutsch et al., *Political Community and the North Atlantic Area* (Princeton: Princeton University Press, 1957); seorang penulis pernah mengemukakan bahwa konsep ini tidak bisa diterapkan pada ASEAN yang tidak identik dengan wilayah Asia Tenggara secara keseluruhannya; lihat Richard W. Mansbach, *Southeast Asia in Transition*, hal. 17; sebaliknya, telah pula dikatakan bahwa "Pada tingkat terendah dari integrasi politik ASEAN telah merupakan ... suatu 'masyarakat keamanan';" lihat Donald W. E. Weatherbee, "ASEAN Regionalism: The Salient Dimension," makalah yang disampaikan pada Konferensi AS-ASEAN II tentang Pembangunan Ekonomi dan Stabilisasi Politik: Alternatif-alternatif Skenario untuk tahun 1980-an (Berkeley, California, 2-4 Mei 1983), hal. 11.

suatu pakta militer seperti SEATO yang anti-komunis dan didukung oleh Amerika Serikat. Bidang-bidang politik dan keamanan adalah bidang-bidang yang sensitif, sedang bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya lebih bersifat netral, dan dalam bidang-bidang inilah, yang kurang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, kerja sama dalam rangka ASEAN bisa dilakukan secara terbuka.

Tetapi menarik perhatian, bahwa dibanding dengan MEE, misalnya, yang dimulai dengan suatu proyek kerja sama dalam bidang ekonomi, meskipun bertujuan politik dalam jangka panjang, yaitu ke arah integrasi Eropa, ASEAN adalah sebaliknya. Negara-negara anggota ASEAN mulai dengan motivasi politik, mengambil keputusan politik dan baru kemudian mengusahakan proyek-proyek kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi dan sosial-budaya. Proyek-proyek ekonomi bersama dalam rangka ASEAN sebenarnya baru mulai ditetapkan secara jelas pada Pertemuan Puncak di Bali dalam bulan Pebruari 1976, itu pun sebagian besar sampai kini tidak berhasil seperti diharapkan semula.

Dalam pengertian itu Pertemuan Puncak Bali merupakan suatu titik-balik dalam kehidupan ASEAN. Tetapi lebih penting lagi, Pertemuan Puncak Bali juga merupakan titik-balik, sebab pada kesempatan itulah untuk pertama kali ASEAN secara resmi dan terbuka mengukuhkan kerja sama dalam bidang politik yang sebenarnya selama itu telah dilakukan, meskipun secara informal.¹ Bagian akhir dari pembukaan Deklarasi Kerukunan ASEAN menyebutkan bahwa negara-negara anggota bersepakat untuk "mengkonsolidasikan hasil-hasil yang telah dicapai ASEAN dan memperluas kerja sama ASEAN dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik." Tambahan pula, program kerja yang ditetapkan oleh Deklarasi Kerukunan ASEAN secara eksplisit meliputi bidang politik sebagai bagian pertama dari program kerja tersebut. Dengan demikian, tidak perlu lagi adanya pembedaan antara pertemuan-pertemuan formal dan informal untuk menghindari kerja sama politik dalam rangka ASEAN.

ARTI KERJA SAMA POLITIK

Memang benar bahwa kerja sama ASEAN dalam bidang politik sampai sekarang lebih banyak bersifat reaksi terhadap tantangan-tantangan dari luar daripada prakarsa ASEAN.² Pembentukan ASEAN itu sendiri merupakan

¹Lihat J. Soedjati Djiwandono, "The ASEAN After the Bali Summit," dalam *The Indonesian Quarterly*, Vol. IV, No. 2, 3, 4 (Special Issue, 1976), hal. 3-19.

²Lihat Russel H. Fifield, "ASEAN: The Perils of Viability," dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 2/3 (December 1980), hal. 199-212.

Jelas bahwa bagi negara-negara anggota lainnya, khususnya Malaysia dan Singapura, yang baru saja menjadi sasaran politik konfrontasi Indonesia, masuknya Indonesia ke dalam kerja sama ASEAN akan mengurangi kemungkinan ancaman dari negara tetangganya yang besar itu terhadap keamanan mereka. Dengan kata lain, di dalam ASEAN Indonesia kurang "berbahaya" daripada di luarnya. Sebaliknya, meskipun dari segi itu sepintas lalu Indonesia kelihatannya berada dalam kedudukan sebagai "sandera," dalam wadah ASEAN itu ia akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh suatu kedudukan primasi atau *primus inter pares* (first among equals), sekurang-kurangnya karena ia adalah negara anggota yang paling besar dari segi luas wilayahnya, jumlah penduduknya, maupun sumber-sumber alamnya, tanpa melalui konfrontasi atau konflik bersenjata.

Pembentukan ASEAN dimungkinkan dan didorong oleh bergantinya haluan politik luar negeri Indonesia tidak saja dari konfrontasi ke politik bertetangga baik, tetapi juga dari ikatannya yang dekat dengan negara-negara blok komunis terutama Uni Soviet dan kemudian RRC, ke suatu politik luar negeri yang lebih condong ke Barat. Kedua hal itu adalah pencerminan perubahan dalam negeri Indonesia ke arah sikap anti-komunis yang ditimbulkan oleh peristiwa Gestapu/PKI tahun 1965. Persamaan sikap politis dan orientasi ideologis yang non-komunis, kalau tidak malahan anti-komunis, di antara kelima negara anggotanya, jelas merupakan suatu faktor penting yang ikut memupuk persatuan mereka dalam ASEAN.

Pertimbangan keamanan bagi kelima negara anggotanya juga merupakan suatu unsur utama dari motivasi pembentukan ASEAN, seperti dinyatakan dengan tegas dalam Deklarasi Bangkok yang menyatakan bahwa mereka "bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan mereka dari campur tangan luar dalam bentuk dan manifestasi apa pun ... dan sebagainya." Konflik regional, seperti konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang baru saja berakhir waktu itu telah terbukti mengundang campur tangan luar. Begitu pula konflik di Indocina yang waktu itu penuh dengan ketidakpastian tentang akhirnya. Dengan bersatu dalam ASEAN dan mengatasi konflik antar mereka terlebih lagi dengan ketidakpastian konflik di Indocina, kelima negara anggotanya berusaha mencegah kemungkinan campur tangan asing yang mengancam keamanannya.

KERJA SAMA POLITIK DAN KEAMANAN?

Atas dasar motivasi utama dari pembentukannya seperti diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa ASEAN pada hakikatnya adalah suatu kerja sama politik dan keamanan regional. Tujuan utamanya adalah mencegah, mem-

kin berbeda dari orang ke orang. Berlainan misalnya dengan MEE, yang tegas-tegas merupakan kerja sama regional dalam bidang ekonomi seperti tampak jelas dari namanya, meskipun mempunyai tujuan-tujuan politis, ASEAN sebagai kerja sama regional tidak memperlihatkan fokus, penekanan, atau titik berat pada sesuatu bidang kehidupan. Bagian pertama dari Deklarasi Bangkok, yang menandai lahirnya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, sekedar menyatakan, "*Pertama*, pembentukan suatu Perserikatan bagi Kerja Sama Regional di antara negara-negara Asia Tenggara yang akan dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)."¹

Meskipun demikian, mungkin karena pengaruh kerja sama regional lain seperti MEE, dan karena faktor-faktor tertentu yang akan diuraikan kemudian dalam tulisan ini, telah kelihatan timbul kesan seakan-akan ASEAN memang merupakan suatu kerja sama dengan titik berat pada bidang ekonomi. Akibatnya ialah bahwa sebagian besar usaha penilaian atas hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka kerja sama ASEAN menekankan bidang ekonomi, yang lebih mudah dikuantifikasikan. Bidang-bidang lain seperti sosial-budaya dan pendidikan yang lebih sulit untuk dikuantifikasikan, dibahas sepintas lalu seakan-akan sebagai embel-embel belaka, sedang bidang politik dan keamanan hampir-hampir tidak mendapat perhatian sama sekali.

Atas dasar persepsi semacam itu tentang ASEAN terutama sebagai suatu kerja sama ekonomi regional, tidak mengherankan jika dengan beberapa pengecualian pada umumnya penilaian atas hasil-hasil ASEAN selama ini tidak memberikan gambaran yang terlalu mengembirakan.² Pada umumnya hubungan ekonomi bilateral, baik dalam hal investasi maupun perdagangan, antara negara-negara anggota ASEAN secara terpisah dan negara-negara dari luar kawasan Asia Tenggara lebih intensif daripada hubungan bilateral antara sesama negara anggota, dan daripada hubungan dalam bidang-bidang itu antara ASEAN secara keseluruhan dan negara-negara tersebut.

Memang, secara luas diakui bahwa negara-negara anggota ASEAN mempunyai pertumbuhan ekonomi yang termasuk paling tinggi di dunia.³ Dan sebagai salah satu maksud dan tujuan ASEAN, dinyatakan dalam bagian kedua dari Deklarasi Bangkok sebagai berikut: "*Kedua*, bahwa tujuan-tujuan dan

¹Kutipan-kutipan dari dokumen-dokumen ASEAN dalam tulisan ini diambil dan diterjemahkan dari *ASEAN Documents* (Jakarta: ASEAN National Secretariat, Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, n.d.).

²Lihat Djisman S. Simandjuntak, "Patterns and Development of ASEAN Economic Cooperation," makalah yang juga diberikan pada Konperensi Perancis-Indonesia IV.

³Lihat Henry Bardach, "ASEAN: Economic Success Story in Southeast Asia," sambutan yang disampaikan pada The Cleveland Council on World Affairs and the Cleveland World Trade Association, tanggal 6 Januari 1983.

awal Juli 1983. Pada pertemuan menteri ASEAN-ME berikutnya mereka akan bersama-sama merumuskan hal-hal spesifik dukungan ME untuk usaha ASEAN menyelesaikan masalah regional utamanya.

Usaha ini bisa membuka jalan bagi peranan politik ASEAN dan ME di dunia politik regional dan global, untuk mendekati masalah-masalah regional dan global secara yang lebih realistis. Realpolitik harus menjadi pusat dialog politik ASEAN-ME di masa depan agar kerja sama inter-regional ini berhasil. Referensi ritualistik pada usul-usul politik yang tidak realistis harus diganti dengan formula-formula yang praktis dan bisa dilaksanakan dalam kasus Kampuchea maupun Afghanistan. Keberhasilan ASEAN mengaktivasi ME dalam usaha menemukan penyelesaian untuk masalah-masalah Asia memang menyolok. Namun ASEAN harus mengajukan jawaban-jawaban yang bisa dilaksanakan bagaimana menggunakan Dialog ASEAN-ME secara optimal untuk memanfaatkan sumber-sumber daya ekonominya.

dan diminta. Kekecewaan dan frustrasi itu bisa dihindari kalau delegasi-delegasi ASEAN mempunyai keahlian yang diperlukan baik mengenai kebutuhan-kebutuhan spesifik ASEAN maupun mengenai kekuatan bidang-bidang kompetensi ME yang sama-sama pentingnya. Sejauh ini terlalu sedikit perhatian diberikan kepada faktor-faktor yang penting itu. Proyeksi-proyeksi dan harapan-harapan kewajiban moral ME pasti memainkan peranannya dalam pendekatan ASEAN terhadap pengelompokan regional Utara ini.

Kemerdekaan benar-benar merupakan sasaran primer persetujuan; suatu persetujuan antara rekan-rekan yang sama kedudukannya, biarpun ME mengakui tingkat perkembangan ASEAN. Interdependensi yang dicapai di bidang politik rupanya tidak mudah dipindahkan ke bidang ekonomi, atau sengaja dihindari. Suatu sikap bersatu dalam ekonomi akan menempatkan ASEAN di tingkat perkembangan negara-negara industri baru (NIC), sedangkan suatu pendekatan lima-ujung akan menguntungkan negara-negara anggota yang relatif lebih lemah basis industrinya dan lebih rendah GNP per jiwanya. Jadi, Indonesia, Pilipina dan Muangthai bisa dipilih untuk mendapatkan bantuan pembangunan di bidang-bidang pembangunan desa dan pertumbuhan produksi pangan, promosi perdagangan ekspor, pengembangan proyek-proyek regional, latihan kejuruan, program-program pendidikan untuk manajer di sektor-sektor pilihan seperti perbankan dan asuransi, dan bantuan di bidang ilmu serta pengetahuan. Dalam uang, bantuan keuangan dan teknik untuk pembangunan pedesaan merupakan komponen-komponen program-program bantuan yang paling penting. Bantuan pembangunan yang masuk dalam kerangka program tahunan pembiayaan proyek-proyek ME di negara-negara yang tidak tergabung, yaitu negara-negara yang tidak tercakup dalam Konvensi Lome, mulai sebelum Persetujuan Kerja Sama Gabungan tahun 1976 dengan anggaran hanya sebesar US\$ 20 juta. Pada tahun 1983 jumlah itu meningkat menjadi US\$ 225 juta. Pada akhir 1982 sekitar US\$ 150 juta digunakan untuk proyek-proyek di ketiga negara ASEAN tersebut. Malaysia dan Singapura tidak termasuk karena pendapatan per jiwa mereka yang tinggi. Dengan demikian suatu pendekatan bersama ASEAN dalam implementasi persetujuan-persetujuan kerja sama ekonomi dan komersial pasti akan membuat Indonesia, Pilipina dan Muangthai kehilangan program-program bantuan pedesaan yang sangat diperlukan itu.

PROSPEK UNTUK PRAKARSA-PRAKARSA MENDATANG ASEAN-ME

Sejarah transaksi ASEAN-ME menyolok karena sejumlah alasan. Ia mulai dengan hubungan-hubungan perdagangan yang meluas menjadi kerja sama komersial, ekonomi dan pembangunan, namun tanpa usaha sedikit pun untuk

nya para menteri ME ingin memberitahukan persepsi mereka mengenai berubahnya pola hubungan Timur-Barat, khususnya pengaruhnya atas Eropa, kepada ASEAN. Mereka juga menyiapkan diri untuk memberikan briefing kepada para menteri ASEAN mengenai penerimaan konsep "Non-Blok sejati" sehubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga oleh NATO.¹ Akan tetapi keprihatinan ASEAN mengenai Kampuchea tampaknya mencegah mereka berbuat demikian. Ini lebih menonjol pada Pertemuan Bangkok 24-25 Maret 1983; kemungkinan besar akibat lebih dekatnya kota ini dengan daerah konflik dan arus pengungsi Khmer. Sepuluh paragraf Deklarasi Bersama menyangkut masalah Kampuchea dan pengungsi lawan tiga saja mengenai masalah Afghanistan. Akan tetapi pihak Eropa berhasil memasukkan masalah Timur Tengah dalam diskusi. Deklarasi Bersama itu memuat dua bab pendek mengenai masalah ini.

Dengan demikian ASEAN secara efektif memanfaatkan kebutuhan ME akan suatu saluran untuk membuktikan kemerdekaan politiknya dari Amerika Serikat dan secara demikian ia dapat mengatur jalannya pertemuan ke arah yang diinginkannya. Sebaliknya, kebutuhan ASEAN akan dukungan ME untuk kebijaksanaan Kampuchea-nya dipenuhi dengan baik oleh pertemuan-pertemuan ASEAN-ME, oleh kesediaan pihak Eropa untuk mendengarkan keprihatinan politik ASEAN.

Pertemuan London itu juga mempunyai artinya sendiri untuk ASEAN. Para menteri luar negeri ME lebih senang membatasi pembicaraan menteri pada soal-soal politik. Soal-soal ekonomi juga dibahas di London, tetapi pembicaraannya sengaja luas, mengenai situasi ekonomi dunia pada umumnya. Soal-soal spesifik dibicarakan di Brussels pada 15 Oktober 1981, sehari sesudah pertemuan menteri, antara kelima menteri luar negeri ASEAN di bawah pimpinan S. Dhanabalan, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Presiden Komisi ME, Gaston Thorn bersama empat rekannya.

Dengan demikian ASEAN disadarkan bahwa para menteri luar negeri ME ingin menggunakan pertemuan menteri untuk soal-soal politik dan soal-soal ekonomi internasional yang bersifat umum saja serta meninggalkan soal-soal ekonomi spesifik bagi Komisi ME di Brussels. ASEAN tidak mempunyai pengaturan semacam itu; Sekretariat ASEAN tidak diciptakan dengan kekuasaan eksekutif yang seluas itu seperti Komisi ME dan untuk masa mendatang ini juga tidak. Karena para menteri luar negeri ASEAN akan terus bertanggung jawab untuk hubungan-hubungan luar negeri dan untuk pembentukan suatu mekanisme bagi perumusan, pengawasan, penanggulangan atau penghentian perundingan-perundingan dengan lain-lain pemerintah dan orga-

¹Malcolm Subhan, "Trade Growing between EEC and ASEAN," dalam *Europa*, Vol. 3, No. 4, Juli-Agustus 1981, hal. 3.

kan oleh *Associated Press* di New York pada bulan April 1973, atas prakarsa Perancis, ME secara konsisten berusaha merumuskan dan memperjuangkan konsep mereka mengenai identitas Eropa yang terpisah dari Amerika Serikat. Mereka berhasil merumuskan deklárasi mereka mengenai identitas Eropa yang diterima pada 14 Desember 1973 pada puncak krisis minyak. Dalam dokumen ini para menteri luar negeri ME menggariskan sasaran-sasaran Eropa mereka, sifat khusus negara-negara anggotanya yang memungkinkan mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai persatuan dan posisi bersatu terhadap lain-lain negara, benua dan kekuatan. Mereka juga merumuskan tempat dan tanggung jawab mereka secara internasional, baik di bidang politik maupun ekonomi, dan di bidang pertahanan.¹

Unifikasi politik ini tidak ditujukan pada suatu negara tertentu dan tidak berakar pada usaha untuk merebut kekuasaan. ME tidak bisa menjadi suatu superpower sendiri di masa mendatang/dekat ini. Itu akan berarti suatu tingkat integrasi politik yang lebih tinggi dan *pari passu* pemilikan suatu penangkal nuklir yang diarahkan pada semua tempat strategis di dunia yang pasti akan menimbulkan hambatan-hambatan yang tidak bisa diatasi, baik praktis maupun politik. Akan tetapi masing-masing negara anggota percaya bahwa usaha unifikasi mereka merupakan suatu "unsur perimbangan" dalam politik internasional. ME tidak bisa menerima suatu kedudukan yang tunduk pada Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Dengan demikian pertemuan menteri ASEAN-ME itu benar-benar merupakan suatu kesempatan yang sangat mengembirakan untuk memperluas kerja sama politik di luar lingkungan geografi Atlantik ME yang langsung, negara-negara Lome, kawasan Laut Tengah dan Timur Tengah. Itu juga merupakan bukti kemampuan Eropa untuk mengadakan suatu dialog politik sendiri dengan suatu kawasan yang simpatik untuk Amerika Serikat. Hal itu dalam rangka program ME berusaha menerapkan cara tindakan kolektif yang sama dalam hubungannya dengan lain-lain bagian dunia dan secara demikian membangun persatuannya sendiri.

Pada pertemuan kedua mereka di Kuala Lumpur para menteri ASEAN dan ME mengulangi komitmen-komitmen mereka satu sama lain dalam soal Kampuchea dan Afghanistan. Mereka menekankan asas-asas dasar hubungan antar negara, yaitu hormat terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah serta kemerdekaan negara-negara, tidak menggunakan kekerasan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri lain-lain negara, asas-asas yang "mempunyai arti vital bagi hubungan antar negara." Kedua pihak berusaha mendapatkan dukungan pihak yang lain untuk keprihatinan bersama mereka mengenai "pemaksaan kemauan kekuatan-kekuatan asing atas negara-negara merdeka yang

¹C.P.F. Luhulima, "Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa," dalam Lie Tek Tjeng dan C.P.F. Luhulima (ed.), *Masalah-masalah Internasional Masa Kini* (5) (Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional - LIPI, 1975), hal. 55.

cepat usaha gabungan untuk memperbaiki akses ke pasaran di luar ASEAN bagi bahan-bahan mentah dan barang-barang jadi mereka dengan mengusahakan penghapusan semua hambatan dagang di pasaran-pasaran itu, mengembangkan penggunaan-penggunaan baru untuk hasil-hasil itu dan mengambil pendekatan-pendekatan dan tindakan-tindakan bersama dalam menghadapi pengelompokan-pengelompokan regional dan kekuatan-kekuatan ekonomi masing-masing; (b) bekerja sama di bidang teknologi dan metode-metode produksi dengan maksud meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas hasil-hasil ekspor maupun mengembangkan hasil-hasil ekspor baru dalam rangka diversifikasi; (c) mengambil pendekatan-pendekatan bersama terhadap masalah-masalah komoditi internasional, seperti pembaharuan sistem moneter internasional dan alih sumber-sumber daya nyata, di PBB dan lain-lain forum multilateral, dengan maksud untuk menunjang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru; (d) memberikan prioritas kepada stabilisasi dan peningkatan pendapatan ekspor komoditi-komoditi yang dihasilkan dan diekspor oleh ASEAN lewat persetujuan-persetujuan komoditi termasuk rencana-rencana cadangan penyangga dan lain-lain sarana."¹

Akan tetapi implementasi garis-garis besar ini dihambat oleh pembatasan-pembatasan prosedural di dalamnya. Asas-asas yang mengatur pelaksanaan kerja sama itu menetapkan bahwa "kerja sama dengan ASEAN sebagai suatu kelompok tidak boleh merugikan pengaturan-pengaturan bilateral yang ada;" bahwa hal itu "harus berfungsi untuk melengkapi kemampuan-kemampuan ASEAN dan tidak menggantikannya," dan lebih penting, bahwa "kerja sama harus tanpa syarat." Ketentuan-ketentuan ini sangat banyak menunjukkan bahwa kepentingan nasional salah satu negara anggota tidak boleh dikorbankan, dan secara demikian melarang prakarsa-prakarsa regional skala besar. Itu menunjukkan ASEAN sebagai suatu variabel usaha nasional yang sangat bergantung.

Pada tahun 1982 para menteri luar negeri ASEAN menerima seperangkat garis besar tambahan yang berkisar pada hal-hal tertentu yang sangat penting: (a) mendapatkan bantuan teknik maupun pembangunan, khususnya untuk proyek-proyek kerja sama ASEAN; (b) memajukan dan mengembangkan perdagangan dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan; (c) memperkuat hubungan-hubungan politik ASEAN dengan pihak-pihak ketiga; (d) meningkatkan kedudukan internasional ASEAN "sebagai suatu organisasi regional yang viable." Namun dinasihatkan sikap berhati-hati dalam memperluas hubungan dengan pihak-pihak ketiga, dan dua imperatif khusus ditambahkan pada perangkat garis besar baru itu: bahwa "hubungan-hubungan semacam itu tidak boleh merugikan proyek-proyek ASEAN yang telah ada"

¹*Declaration of ASEAN Concord*, para 3 (iv), (v) dan para 4 (i), (ii).

Seperti halnya dengan ME, ASEAN juga berusaha mempertahankan pemisahan tradisional hubungan ekonomi ekstern dan urusan luar negeri. Di ASEAN suatu pengaturan non-lembaga semacam itu terdapat di bidang kerja sama politik. Para menteri luar negeri ASEAN juga bekerja sama "inter-pemerintah" atas dasar persetujuan-persetujuan informal yang tidak mengikat.

Sejak pelebagaan mereka pada tahun 1976, menteri-menteri ekonomi ASEAN menantang menteri-menteri luar negeri untuk kedudukan dan tanggung jawab pengambil keputusan yang sebanding di bidang ekonomi dan kebijaksanaan luar negeri ekonomi. Mereka menuntut dilibatkan dalam dialog dengan pihak-pihak ketiga, khususnya di mana ekonomi menguasai pertemuan-pertemuan itu. Kenyataannya, mereka menganjurkan kepada para kepala pemerintah pada KTT ASEAN yang kedua di Kuala Lumpur tahun 1977 agar dalam keadaan semacam itu para menteri ekonomi menguasai pertemuan. Tampaknya mereka sadar akan polarisasi yang bisa mereka abadikan dan oleh sebab itu mereka memperlunak tuntutan agresif mereka dengan menambahkan "dengan dukungan penuh dari Menteri-menteri Luar Negeri mereka."

Deklarasi ASEAN tahun 1967 yang menempatkan para menteri luar negeri di puncak hirarki ASEAN secara demikian tidak diganti, biarpun diadakan beberapa penyesuaian. Para menteri luar negeri ASEAN "akan terus bertanggung jawab untuk perumusan pedoman-pedoman dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN. Ia akan memeriksa implikasi-implikasi politik keputusan-keputusan ASEAN untuk meningkatkan peranannya sebagai koordinator umum kebijaksanaan-kebijaksanaan ASEAN karena selalu terdapat dimensi-dimensi politik dan diplomatik dalam seluruh kegiatan ASEAN." Ia juga bisa mendapat penilaian AEM (Menteri-menteri Ekonomi ASEAN) mengenai kemungkinan-kemungkinan keuntungan ekonomi dan perdagangan dari rekan-rekan dialog yang baru diproyeksikan.

KAITAN-KAITAN STRUKTURAL: SALURAN-SALURAN KERJA SAMA EFEKTIF

Usaha pertama ASEAN untuk melembagakan kaitan struktural dengan ME guna memajukan hubungan inter-regionalnya adalah pembentukan Komite Koordinasi Khusus ASEAN (SCCAN) oleh para menteri perdagangan ASEAN. Tugasnya digariskan dengan jelas: "mengadakan suatu dialog berlanjut atas dasar suatu pendekatan bersama dan kolektif antara negara-negara anggota ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Eropa dengan cara yang dilembagakan dalam rangka mengusahakan hubungan dengan ME yang paling meng-

tuk mencapai persamaan yang merupakan prasyarat untuk interdependensi yang bisa diterima kedua pihak itu. Dalam keadaannya sekarang ini, hubungan semacam itu hanya terdapat di bidang politik.

Koordinasi Kebijakan Ekstern: Kasus ME dan ASEAN

Sejak 1969 dapat diidentifikasi dua aliran kebijakan Eropa yang terpisah: (1) hubungan ekstern ME yang didasarkan atas perjanjian-perjanjian dan dibentuk oleh lembaga-lembaga masyarakat itu; dan (2) organisasi untuk Kerja Sama Politik Eropa (EPC) di mana para menteri luar negeri negara-negara anggota bekerja sama secara "inter-pemerintah" atas dasar persetujuan-persetujuan informal yang tidak mengikat. Tiada lembaga-lembaga formal atau permanen disediakan untuk melaksanakan persetujuan-persetujuan itu.

Sasaran-sasaran Kerja Sama Politik Eropa bisa diringkas sebagai berikut: (a) menjamin saling pengertian yang lebih baik dalam masalah-masalah politik internasional yang penting lewat informasi atau konsultasi teratur; (b) memajukan harmonisasi pandangan-pandangan dan koordinasi posisi-posisi; dan (c) berusaha mencapai suatu pendekatan bersama terhadap kasus-kasus spesifik.¹

Memang sangat sulit menilai sejauh mana EPC telah mampu mewujudkan sasaran-sasaran ini. Suatu tingkat informasi yang tidak memadai merupakan salah satu sebabnya karena EPC diliputi suatu tingkat konfidensialitas yang sangat tinggi. Oleh sebab itu juga sulit menilai sejauh mana pandangan-pandangan bersama di antara 10 negara itu bisa dilacak kembali pada kerja sama mereka dalam EPC, atau apakah perubahan-perubahan dalam urusan-urusan nasional atau internasional juga bertanggung jawab untuk posisi-posisi yang lebih dekat di antara mereka. Sejauh ini EPC rupanya melakukan "refleks koordinasi" terhadap soal-soal yang mereka hadapi secara langsung dalam kawasan mereka atau dalam kawasan tetangganya, seperti Konperensi Helsinki tahun 1975, Konperensi Beograd tahun 1978, dan Dialog Eropa-Arab. Dialog ASEAN-ME mula-mula bukan tanggung jawab EPC, tetapi tanggung jawab Komisi tersebut, Komite ASEAN-Brussels (ABC) dan Komite Wakil-wakil Permanen (Coreper) Dewan Menteri ME. Adalah diskusi-diskusi antara kedua kelompok yang terakhir ini yang meletakkan dasar untuk Pertemuan Menteri ASEAN-ME di Brussels pada bulan Nopember 1978.

¹Wolfgang Wessels, "European Political Cooperation: A New Approach to European Foreign Policy," dalam David Allen, Reinhardt Rummel dan Wolfgang Wessels (ed.), *European Political Cooperation* (London: Butterworth Scientific, 1982), hal. 2.

pokok acuan pendekatan-pendekatan ASEAN, pertemuan-pertemuan menteri ASEAN-ME dan Persetujuan Kerja Sama Gabungan, dan akhirnya prospek-prospek prakarsa mendatang, yaitu meningkatkan prakarsa-prakarsa politik ASEAN-ME untuk juga menangani masalah-masalah global.

MOTIVASI-MOTIVASI POLITIK KERJA SAMA INTER-REGIONAL

Diprakarsainya kerja sama antara ASEAN dan ME adalah suatu usaha ASEAN dan sudah mulai pada bulan Maret 1971, pada Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-4 di Manila, sebelum dialog dengan negara-negara kawasan Pasifik, Jepang, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Kanada dimulai. Adalah setahun kemudian, pada Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-5, bahwa gagasan pelebagaan dialog dengan ME disetujui secara formal.

Pendekatan ASEAN terutama diambil untuk membuka hubungan perdagangan dengan ME: merundingkan syarat-syarat perdagangan (terms of trade) yang lebih baik untuk hasil-hasil pertanian ASEAN. Mula-mula dialognya dimaksud secara eksklusif untuk mendapatkan akses yang lebih luas untuk ekspor ASEAN dan suatu rencana stabilisasi harga untuk ekspor ASEAN. Sejak 1975, dengan pembentukan Kelompok Studi Gabungan, bidang-bidang kerja sama yang lebih luas dimasukkan: usaha-usaha patungan dalam eksplorasi sumber-sumber daya ASEAN, liberalisasi hasil-hasil industri ASEAN, kemungkinan mendorong tingkat partisipasi tertentu ME dalam kegiatan-kegiatan manufaktur ASEAN dan mengerahkan modal untuk membiayai proyek-proyek ASEAN. Dengan pembentukan Komite Kerja Sama Gabungan (JCC) pada bulan Maret 1980, bidang-bidang kerja sama diperluas lebih lanjut dalam bidang-bidang kerja sama komersial, ekonomi dan pembangunan.

Ketergantungan Lawan Saling Ketergantungan

ME adalah rekanan dagang ASEAN yang besar sesudah Jepang dan Amerika Serikat. Perdagangan ASEAN dengan ME adalah 14% seluruh perdagangan luar negerinya. Angka ini memang jauh lebih rendah daripada perdagangan ASEAN dengan Jepang yang mencapai 25% seluruh perdagangan luar negerinya dan perdagangan dengan Amerika Serikat yang mencapai sekitar 18% dari keseluruhannya. Di lain pihak, perdagangan ME dengan ASEAN hanya 2,4% seluruh perdagangannya pada tahun 1980, dan 2,7% pada tahun 1981, sedangkan perdagangannya dengan Amerika Latin sedikit lebih besar, yaitu 5,3%.

**Re-exports, Commodities &
Transactions not Classified
According to Kind**

			18,871		17,186		91.1
Total Imports	—	—	8,793,984	—	13,167,013	—	149.7
Foodstuffs	—	—	364,631	—	335,497	—	92.0
Shrimps, Prawns & Lobsters (Crustacea & Molluscs)	MT	29,713	259,481	27,621	217,485	93.0	83.8
Raw Materials	—	—	1,795,681	—	1,852,024	—	103.1
Metallic Raw Materials	—	—	184,458	—	354,454	—	192.2
Non-ferrous Metal Ore	—	—	184,180	—	353,766	—	192.1
Copper Ore	MT	144,047	87,429	157,109	122,065	109.1	139.6
Nickel Ore & Mette	—	—	77,250	—	201,816	—	261.3
Bauxite	MT	1,012,459	19,316	1,225,072	29,317	121.0	151.8
Other Raw Materials	—	—	1,610,989	—	1,497,394	—	92.9
Natural Rubber	MT	34,503	42,596	44,815	62,089	129.9	145.8
Wood	KCM	10,045	1,534,495	9,031	1,404,354	89.9	91.5
Palm Oil	MT	8,528	5,545	8,648	4,836	101.4	87.2
Mineral Fuels	—	—	6,468,988	—	10,779,467	—	166.6
Crude & Partially Refined Oil	KKL	40,552	4,882,150	36,415	7,566,701	89.8	155.0
Heavy Fuel Oil	KKL	3,634	480,910	3,983	813,255	109.6	169.1
Liquefied Natural Gas	KMT	6,165	1,090,797	8,504	2,306,448	137.9	211.4
Manufactured Products	—	—	159,711	—	195,363	—	122.3
Chemicals	—	—	10,261	—	11,589	—	112.9
Machinery & Equipment	—	—	744	—	11,317	—	15.2
Other Products	—	—	148,705	—	172,456	—	116.0
Unwrought Tin	MT	6,423	94,676	6,324	105,500	98.5	111.4
Re-Imports Commodities & Transactions not Classified According to Kind	—	—	4,974	—	4,662	—	93.7

Source: White Paper on Trade, 1981.

Tabel 4

TRADE WITH INDONESIA

(Units: US\$ 1,000)

Commodity	Year	Units of Quantity	1979		1980		Compared with Previous Year (%)	
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
Total Exports		—	—	2,123,798	—	3,457,603	—	162.8
Foodstuffs		—	—	42,643	—	75,367	—	176.7
Fish & Shellfish	MT	1,039	876	3,047	1,912	293.3	218.3	
Raw Materials & Fuels		—	—	27,748	—	42,281	—	152.4
Synthetic Rubber	MT	10,530	9,435	12,859	14,771	122.1	156.6	
Mineral Fuels	—	—	10,256	—	13,776	—	134.3	
Lubricating Oil & Grease	—	—	7,384	—	10,944	—	148.2	
Light Industrial Products		—	—	253,457	—	318,423	—	125.6
Textiles Materials	—	—	127,111	—	143,097	—	112.6	
Man-made Fibers								
(Textile Raw Materials)	MT	27,573	38,789	27,748	46,049	100.6	118.7	
Yarn	MT	16,435	53,845	12,571	48,744	76.5	90.5	
Fabrics	—	—	24,828	—	34,825	—	140.3	
Secondary Textile Products	—	—	9,602	—	13,435	—	139.9	
Non-metallic Mineral Products								
Cement	KMT	105	8,893	140	13,794	133.3	155.1	
Other Light Industrial Products								
Rubber Products	MT	4,761	14,389	7,032	22,681	147.7	157.6	
Paper & Paper Products	MT	42,065	39,081	34,416	39,836	81.8	101.9	
Other Products	—	—	46,456	—	68,119	—	146.6	
Heavy & Chemical Industrial Products								
Chemicals	—	—	331,238	—	363,359	—	109.7	
Organic Compounds	MT	105,747	95,083	94,431	105,157	89.3	110.6	
Inorganic Compounds	MT	127,731	32,206	182,695	42,664	143.0	132.5	
Dyes & Coatings	MT	7,822	23,427	8,404	25,898	107.4	110.5	
Essential Oil	—	—	—	—	—	—	—	
Perfumes & Cosmetic	—	—	18,699	—	15,731	—	84.1	
Chemical Fertilizers	MT	28,894	4,733	49,932	9,201	172.8	194.4	
Plastic Materials &	—	—	—	—	—	—	—	
Artificial Resins	MT	114,612	125,607	96,950	129,460	84.5	163.1	
Other Chemical Products	—	—	26,292	—	28,144	—	107.0	
Metals								
Iron & Steel	MT	857,527	360,859	1,203,889	573,834	140.4	159.0	
Bars & Shapes	MT	68,722	27,030	161,656	67,678	235.2	250.4	
Wire Rods	MT	64,230	19,875	35,681	12,503	55.6	63.0	
Heavy Plates & Sheets	MT	44,733	15,843	68,912	28,588	154.1	180.4	
Plates & Sheets	MT	378,110	157,271	483,073	219,679	127.8	139.7	
Tinned Plates & Sheets	MT	33,865	20,850	42,911	30,304	126.7	145.3	

Tabel 2

EXPORTS BY COUNTRIES OF DESTINATION

Countries	1979		1980		January/October 1981		November 1981	
	1,000 ton	US\$ 1,000,000	1,000 ton	US\$ 1,000,000	1,000 ton	US\$ 1,000,000	1,000 ton	US\$ 1,000,000
ASEAN	11,236.6	2,232.5	12,562.5	2,759.3	8,461.9	2,203.1	1,905.9	285.8
Malaysia	326.3	66.2	268.2	59.9	231.7	50.7	12.7	2.5
Muangthai	476.2	37.5	295.5	34.7	199.8	26.7	45.8	4.0
Philippines	1,191.9	165.0	815.4	181.2	1,253.8	330.6	194.5	52.1
Singapore	9,242.2	1,963.8	11,183.0	2,483.5	6,776.6	1,795.1	1,652.9	227.2
Hong Kong	391.8	99.1	530.0	152.0	448.0	120.0	13.6	6.6
Japan	52,816.2	7,191.9	49,727.5	10,792.4	34,360.2	8,568.6	4,246.7	1,115.0
Others Asia	7,058.4	806.7	5,367.5	801.5	3,151.5	617.4	430.1	114.3
Africa	86.7	32.1	90.8	56.1	29.6	29.5	3.3	2.9
USA	18,928.9	3,170.7	15,640.9	4,303.3	11,025.8	3,283.8	1,412.9	428.7
Canada	27.6	28.0	25.4	27.5	16.5	19.0	1.2	1.0
Others America	3,126.4	430.4	3,985.3	922.9	5,878.0	1,529.2	962.5	249.3
Australia	1,036.3	190.0	1,305.4	339.1	1,374.0	387.4	158.2	44.0
Others Oceania	282.1	51.0	363.2	108.4	520.8	161.1	56.1	17.6
MEE	3,084.4	1,173.2	2,569.0	1,387.7	2,018.4	786.6	128.3	105.6
England	118.7	88.9	123.3	141.7	148.3	83.2	16.0	35.1
Nederland	1,095.0	399.1	570.6	141.9	620.8	290.4	22.2	32.2
West Germany	1,174.4	337.6	1,010.9	389.0	756.5	201.8	55.6	17.1
Belgium & Luxemburg	50.7	17.9	61.4	24.8	60.9	15.6	4.4	1.8
France	209.2	76.6	315.4	122.2	44.6	42.8	6.4	3.8
Denmark	20.5	42.9	14.0	40.0	25.8	13.1	0.3	0.8
Irelandia	0.1	0.2	0.3	0.7	0.1	0.3	0.0	0.0
Italy	415.8	210.0	473.1	254.4	361.4	139.4	23.4	14.8
USSR	50.0	55.0	52.8	72.9	67.1	71.4	4.8	4.7
Others Europe	142.6	129.5	291.6	185.8	644.5	235.0	26.6	6.2
<i>Total</i>	<i>98,268.0</i>	<i>15,590.1</i>	<i>92,511.5</i>	<i>21,908.9</i>	<i>67,978.0</i>	<i>18,012.1</i>	<i>9,350.2</i>	<i>2,381.7</i>

Note: In Net Weight.

kita untuk mengetahui elemen dari perkembangan ini ada semacam kekuatan yang terpadu. Ini mungkin juga merupakan kasus, bila negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Muangthai dan lain-lain memandang ke Timur untuk memperoleh inspirasi baru dan cara pengembangan kekuatan, kemampuan sumber daya nasional. Tidak ada gunanya bila kita harus menyalahkan Jepang atau negara industri lain untuk menjadi pemain-pemain utama dari hubungan asimetris dan untuk suatu pengembangan sejenis keadaan perang dagang. Indonesia harus memahami bahwa perkembangan di dunia bisnis internasional akan hanya menyenangkan mereka, yang sanggup mengembangkan semacam kekuatan yang terpadu ini.

Seperti telah disebutkan di atas, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sektor bisnis Indonesia dalam tahun-tahun mendatang akan menjadi sangat besar. Dengan memanfaatkan semakin meningkatnya tingkat kepercayaan terhadap bangsa sektor swasta Indonesia telah tampil ke depan selama 15 tahun terakhir dan telah mengembangkan tingkat kematangan bisnis. Sejumlah pengelompokan telah berusaha mencari modal yang dibutuhkan di pasar modal dan pasar uang internasional untuk membiayai proyek-proyek mereka atau melengkapi modal kerja mereka. Kelompok ini secara bertahap telah menjadi lebih bebas dari apa yang disebut konsep *package deal*. Dewasa ini banyak dari sektor swasta mampu memenuhi kebutuhan modal mereka sendiri dan dengan berbuat demikian mereka akan mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk membeli teknologi dari spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan konsep *package deal*. Dalam arti tertentu, kematangan perkembangan mungkin telah diamati oleh masyarakat bisnis di Jepang. Oleh karena sektor swasta Indonesia berkembang di masa mendatang, diharapkan bahwa kerja sama (*partnership*) antara dua masyarakat bisnis dan industri akan mengenal dan menghargai kekuatan yang telah dikembangkan dalam 15 tahun terakhir ini. Masyarakat bisnis di Jepang akan harus mempertimbangkan juga usaha dan proses yang meningkat dalam perekonomian Indonesia terutama akan terjadinya perubahan dalam pola perdagangan dan investasi. Bila dalam Repelita yang akan datang perekonomian Indonesia mulai berkembang untuk menjadi pemasok bahan baku industri (yang dimaksud bahan baku yang belum diolah) maka pola perdagangan dan investasi antara dua negara ini mungkin mengalami perubahan, dengan demikian akan menghasilkan penilaian yang lebih baik terhadap saling ketergantungan bisnis dan industri antara kedua negara. Perubahan pola perdagangan dan investasi akan menghasilkan perubahan kelembagaan, terutama di sektor perdagangan dan jasa (seperti perbankan dan lain-lain). Perubahan-perubahan ini diharapkan akan memperkuat kedudukan masyarakat industri dan bisnis di Indonesia.

Suatu masyarakat bisnis yang lebih percaya diri dan kuat akan muncul dalam tahun-tahun mendatang, sehingga hal ini penting bahwa masyarakat bisnis Jepang akan menyadari kecenderungan ini di Indonesia.

7. *Misi Nasional*. Sepanjang faktor-faktor tersebut di atas, yang dikembangkan oleh Jepang selama bertahun-tahun dengan maksud untuk mewujudkan strategi nasional dan menterjemahkan strategi nasional ini menjadi operasional maka suatu arti misi nasional dan sejenis "mental penguasa" juga telah dikembangkan, baik secara sadar maupun tidak, yang telah mengilhami pimpinan puncak bisnis dan tim manajer mereka.

Kombinasi dan mobilisasi dari faktor atau kekuatan ini dapat ditafsirkan sebagai "suatu sistem operasional terpadu" yang tidak adaandingannya di dunia bisnis internasional. Kiranya akan menarik untuk diketahui apakah ini juga diterima oleh pemimpin-pemimpin bisnis Jepang dan elite birokratnya. Ini tergantung bagaimana penulis memahami kekuatan ekonomi dan bisnis yang telah berkembang selama 25 tahun terakhir, dan mekanisme ini terbukti menjadi senjata ekonomi yang kuat dan sangat efektif untuk menghadapi segala macam krisis ekonomi.

PENGAMATAN PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN

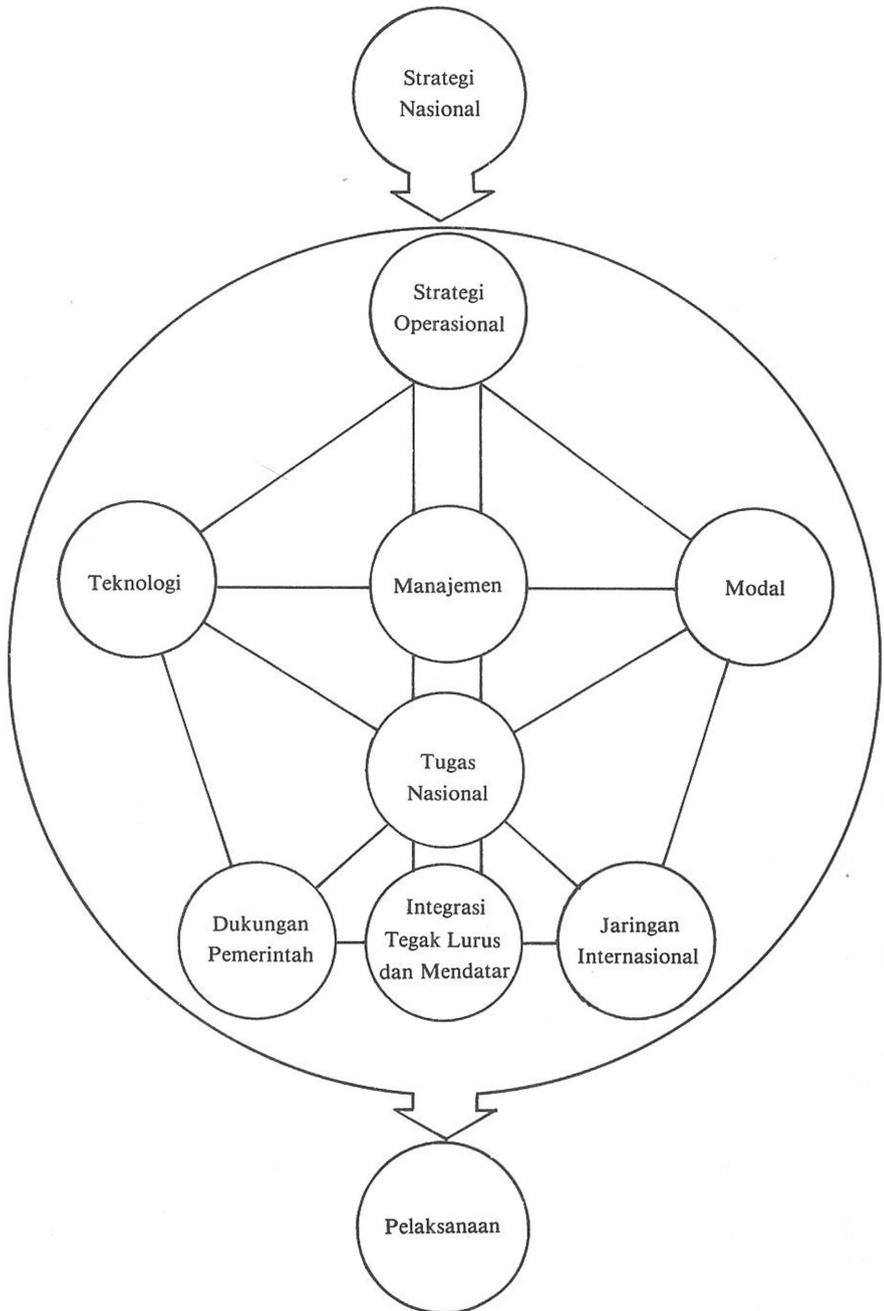
Dari sudut pandangan kuantitatif dan kualitatif, pengamatan kami adalah bahwa hubungan bisnis antara dua negara cenderung menuju arah hubungan yang asimetris.

Sudut kuantitatif sudah digambarkan oleh tabel-tabel dan berbagai data yang menunjukkan kedudukan Jepang yang kuat dan dominan dalam sektor perdagangan dan investasi. Ini dapat menjadikan hasil kualitatifnya lebih kuat, karena tidak hanya diterapkan dalam kasus Indonesia tetapi juga pada hubungan Jepang dengan dunia bisnis internasional.

Strategi Jepang mengejar kehadiran dominan dalam dunia bisnis internasional sudah menghasilkan proses dinamis kombinasi dan mobilisasi seluruh sumber daya kekuatan dan homogenitas latar belakang kebudayaannya. Ekonomi dan bisnis permesinan Jepang sudah mendirikan suatu sistem operasi nasional terpadu yang tak adaandingannya di dunia internasional. Konsep persekutuan Jepang yang paling mungkin, sadar atau tidak, semacam "kekaisaran mentalitas dan hegemoni" tampaknya dicerminkan dalam pengertian tugas mereka untuk menemukan kedudukan yang menonjol dan dominan dalam dunia bisnis internasional. Ini sudah memungkinkan orang Jepang menterjemahkan strategi nasional ke dalam strategi operasional, yang berarti bahwa mereka sudah berhasil dalam mengkombinasikan dan memobilisasikan manajemen, teknologi, modal, dukungan dan bimbingan pemerintah, jaringan internasional, organisasi tegak lurus dan mendatar, dan pengertian tugas nasional mengenai hegemoni konsep mentalitas kekaisaran, dan dengan melakukan demikian mereka sudah menciptakan suatu "sistem nasional ter-

Gambar 1

SISTEM BISNIS TERPADU JEPANG



Sumber: J. Panglaykim.

Seperti ditunjukkan oleh Hollerman, semua keputusan Jepang yang dibuat oleh sektor swasta dan sektor pemerintah, tampaknya mencerminkan "kepentingan nasional," seperti perjuangan, ketergantungan, kontinuitas, stabilitas dan keamanan ekonomi. Ini merupakan dasar sejauh merupakan penerapan strategi nasional yang disepakati yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan menjadi mengikuti dalam bidang/lapangan politik, militer dan ekonomi. Tetapi seperti Jepang sudah mengetahui, khususnya dalam KTT Puncak Ekonomi terakhir di Versailles dan juga dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, yang sudah mencapai suatu "titik didih" harus menjadi kenyataan yang akan makin berkurang dalam kedudukan untuk memisahkan ekonomi dari politik.

Pandangan Lain: Pandangan dari Far Eastern Economic Review

Kesimpulan yang dicapai oleh Far Eastern Economic Review (FEER) dalam suatu artikel pusat 11 Juni 1982 persoalan yang berjudul "Jepang '82: Perang Perdagangan" akan diklasifikasikan kembali di sini berdasarkan pendekatan sistematis yang disarankan oleh Hollerman.

1. *Fungsional*. "Masyarakat Jepang pada dasarnya tidak membuat uang tetapi mencari tempat di dunia melalui perdagangan, berarti jaminan sebagai bagian terbesar yang dimungkinkan dari pasaran dunia. Jepang tidak mempunyai cara hidup lain, kecuali seperti cara di atas."
2. *Struktural*. Menurut pendapat kami, banyak kesimpulan yang dicapai oleh FEER tampaknya merupakan sifat struktural. Mereka merumuskannya sebagai berikut:
 - Orang Jepang mempunyai program pembangunan yang lebih efektif (yaitu sungguh-sungguh mempunyai suatu program) dan program untuk memajukan perdagangan. Orang-orang lain tidak menyukai hal itu;
 - Jenis barang yang diperkirkakan normal dalam masyarakat Barat yang *me-me* (konsumen memrotos harga yang tinggi untuk kemewahan, jalur-jalur paralel impor memotong harga-harga, *discount houses* dan *bargain basements*) baik tidak berada di Jepang atau hanya beroperasi apabila mereka merugikan kepentingan bukan orang Jepang. Orang-orang asing dibuat bingung dan dicurigai menipu;
 - Jepang diduga sangat kuat akan menjadi sekutu yang tak dapat dipercaya karena persekutuan merupakan konsep Barat, tidak dikenal di Asia. Masyarakat Konfusius mengetahui kekaisaran (secara teknis, hanya tinggal di Jepang), hegemoni, raja-raja jajahan dan negara-negara langganan. Semua ini diambil dari ide hirarki harmonis menurut dasar Konfusiusme. Dalam jangka panjang mungkin dapat lebih realistis daripada

Pendekatan dan Konsep Hollerman

Dampak Hubungan

Dampak hubungan dapat berasal dari sumber-sumber struktural dan kebijakan.

1. *Sumber-sumber Struktural.* Salah satu sumber penting yang dapat dilihat sebagai struktural adalah "anatomi tegak lurus perdagangan luar negeri Jepang." Dan terminologi kami pembentukan kompleks industri dan perdagangan dari aktor-aktor Jepang secara organisasi dilihat sebagai konglomerat tegak lurus/mendatar yang merupakan hasil strategi Jepang dan mengarah pada ekspor industrialisasi. Ini merupakan akibat dari struktur ekonomi yang kurang dibantu oleh sumber daya alam. Strategi Jepang ini menuju organisasi konglomerat yang tegak lurus dan mendatar sebagai bagian dari sistem nasional Jepang terintegrasi.
2. *Sumber-sumber Kebijakan.* Sebagai hasil strategi yang disebutkan di atas, Jepang harus mengejar "strategi dari sudut suplai" yang berhubungan dengan doktrin "keuntungan komparatif" yang dinamis. Sasarannya adalah "mencapai kekuatan persaingan dalam pasar Amerika Serikat." Setelah berhasil menembus pasar bersaing Amerika Serikat, pasar sisanya di dunia akan lebih mudah ditembus dan memperoleh bagian yang berarti dari pasar dalam negeri dan internasional.

Sifat Bisnis dan Dampak Ekonomi

1. *Sumber dan Sifat Dampak.* Dampak ekonomi dapat timbul dari sejumlah sumber. Ini dapat bersifat fungsional, baik langsung maupun tidak langsung, atau pada tingkat makro atau mikro, tetapi dapat juga berdasarkan orientasi kebijakan atau struktural. Ini berarti juga bahwa dampak dapat merupakan campuran dari ini semua, yang berasal dari sejumlah sumber.
2. *Fungsional.* Jepang sebagai suatu keseluruhan dan aktor khususnya telah menjadi pensuplai, langganan, saingan dan penyelenggara, semua dalam satu. Ini akan menghasilkan arus barang, jasa (perbankan dan lain-lain), orang, barang modal, perlengkapan dan teknologi. Dengan perkataan lain, mereka sudah mengelola menjadi pemberi nafkah, pensuplai, langganan dan penyelenggara bermacam-macam barang dan jasa.

Dengan memperhatikan ekspor kita, Jepang merupakan pemimpin importir bahan mentah kita. Dari tabel dan angka yang disebutkan tadi, yang sudah mendapatkan dari sumber-sumber Jepang, ekspor kita ke Jepang dalam tahun 1980 sekitar US\$ 13,2 milyar, di luar US\$ 10,8 milyar untuk bahan bakar mineral (minyak, LNG dan minyak bakar berat), sementara sisa US\$ 1,8 milyar untuk bahan mentah yang belum diproses seperti nikel, bauksit, karet, kayu dan minyak kelapa sawit. Karenanya dapat dikatakan bahwa ekspor kita ke Jepang didominasi oleh minyak dan bahan mentah yang belum diproses. Di lain pihak, impor kita dari Jepang untuk tahun 1980 berjumlah, menurut angka-angka Jepang, US\$ 3,5 milyar, unsur-unsur utama adalah produk kimia dan industri berat, permesinan dan perlengkapan. Ini memberikan kepada kita gambaran pola penanaman modal Jepang yang dipusatkan pada manufaktur.

Seperti ditunjukkan sebelumnya, kita hanya akan mendiskusikan sangat singkat aspek-aspek kuantitatif dari hubungan bisnis antara Jepang dan Indonesia. Dari sudut pandangan penanaman modal asing, Jepang seperti dikenal oleh banyak di antara kita, sudah memusatkan penanaman modal mereka dalam sektor manufaktur, dan pola ini sudah sangat banyak dicerminkan dalam pola perdagangan impor dari Jepang, yang dipusatkan secara berat dalam bahan mentah industri, permesinan dan perlengkapan sebagai hasil dari pemusatan dalam manufaktur. Di lain pihak, Indonesia sudah menjadi pen-suplai minyak dan bahan mentah yang belum diproses seperti bauksit, tembaga, nikel, karet, kayu dan minyak kelapa sawit.

Perusahaan Perdagangan Besar (Sogo Shosha)

Apabila kita mengamati hubungan bisnis ini dari titik pandangan kelembagaan, peran utama dalam arena ini adalah perusahaan perdagangan yang besar, yang sudah mengawali pada tingkat permulaan sejumlah usaha patungan dengan unit industri di Jepang. Dalam prakteknya setiap usaha patungan perusahaan-perusahaan perdagangan besar (Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Nisho-Iwai, C. Itoh, hanya disebutkan beberapa nama) dilibatkan sebagai penyelenggara dan pemrakarsa. Karena itu penting dicatat bahwa jumlah yang ditanamkan secara resmi dalam sejumlah usaha patungan hanya merupakan sebagian dari seluruh kesepakatan yang berhubungan dengan berbagai bentuk rencana keuangan dengan sektor bisnis dan industri Indonesia. Jumlah seluruhnya yang dilibatkan dan dimasukkan melalui perusahaan perdagangan besar, Sogo Shosha, bank dagang dan lembaga-lembaga keuangan Jepang lainnya, dapat sungguh-sungguh kuat seperti ditunjukkan sebelumnya. Jumlah penanaman modal secara resmi US\$ 2 milyar, tetapi hanya merupakan ujung gunung es. Ini juga tidak dapat dikatakan seluruhnya, karena